

**PERANAN “TAKSI MINA BAHARI” TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO**

**LAPORAN SKRIPSI
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN**

Oleh :

ANDI HAERUL YANI

0510842001



**FAKULTAS PERIKANAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2007

**PERANAN “TAKSI MINA BAHARI” TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO**

*Skripsi Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Perikanan Pada Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang*

Oleh :

**ANDI HAERUL YANI
0510842001**

**Mengetahui,
Dosen Penguji I**

**Ir. EDI SUSILO, MS
Tanggal :**

Dosen Penguji II

**ZAINAL ABIDIN, S.Pi
Tanggal :**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing I**

**Ir. ISMADI, MS
Tanggal :**

Dosen Pembimbing II

**Ir. NUDDIN HARAHAP, MP
Tanggal :**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan MSP**

**Ir. MAHENO SRI WIDODO, MS
Tanggal :**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji Syukur yang tiada hentinya kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat_nya yang selalu menyertai langkah ku meski diri ini semakin menghitam oleh dosa.

“Wahai Allah, yang membolak balikkan hati, teguhkanlah hati ini diatas Agama_mu”

Thx to My Family, Ayah dan Ibu atas setiap cucuran keringat dan air mata yang tcurahkan untuk hidup dan masa depan ku, semoga karya dan kelulusan ku ini membuat kalian bangga dan bahagia.

“tiada pernah ku temui kesetiaan dan kesabaran seperti Ayah dan Ibu”

Paman N Tante serta Saudara Ku makasih atas bantuan dan doanya (*Love U All...*)

Kepada Bpk N Bu Dosen terima kasih atas segala ilmunya, Insha 4JJI dengan ilmu yg engkau berikan dapat mengantarkanku ke gerbang masa depan yang cerah

Dear ... **My Friends Arek² Aljers 04ⁿ05** Abah About, Condoy, Boby, Djasrin, Te`Rova, Agung, Isthy, Ijhal, Bom2 Bogor, Teuku Ari, Tobing, Amar, Hadit, Willy, Adam, Ari papua, Cris, Mario, (Ketua Aljers), Ivan`k, Denggan, Mimi, Lisa, Ika, Elvi, Ambank, Widya, Dwi. Tak pernah ku temui mahluk manis dan sebaik kalian.....Terima kasih atas kebersamaannya selama di negeri orang. **Arek² kkm klp 7** (ingat kah akan semboyang qt “Pitu Quto...”) Rendy (makasih byk udh Bantu aq) Izal Stones (akhirnya aq nyusul jg)

Arek² penghuni Lapas 60^a Jabrik (sang Vokalis sekaligus Mujikari) Zhaqi boy (wong Arab tp ngaku wong Cino) Beny (eMbahx duKun) Luby, Emal, Paman Gober, Ipul N temen2 Blok Bawah makasih atas kebersamaannya selama ini pokoke tak ada batas untuk berinspirasi dan berteriak GanyaK Ibu Kost !!!!!!!!

Teman2 Blok Selatan di Gorontalo Mety, Alief, Fhyan (makasih banyak ats bantuanx slama di lokasi pnlitian) Opa (makasih udh ngantar jemput wkt penelitian)

KATA PENGANTAR

Bismillahirramanirahim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan laporan skripsi yang berjudul Peranan “Taksi Mina Bahari” Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kota Gorontalo ini dapat terselesaikan.

Laporan skripsi ini membahas tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Gorontalo melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir dengan konsep pembinaan usaha perikanan yang disebut dengan “Taksi Mina Bahari”. Atas terselesainya laporan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Ir. Ismadi, MS selaku dosen pembimbing I
2. Bapak Ir. Nuddin Harahap, MP selaku dosen pembimbing II
3. Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo beserta staf
4. Manajemen Taksi Mina Bahari Unit Tenda
5. Semua pihak yang membantu penulis selama menyelesaikan penelitian

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan kemampuan, sehingga laporan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang memerlukannya, Amien.

Malang, Agustus 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pembinaan Masyarakat Pesisir	9
2.2 Konsep Pembinaan Masyarakat Pesisir	10
2.3 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Otonomi Daerah	12
2.4 Program Taksi Mina Bahari	13
2.5 Kelembagaan Taksi Mina Bahari	15
2.5.1 Lembaga Keuangan Nelayan	15
2.5.2 Lembaga Penjamin Usaha/Kredit	15
2.5.3 Unit Armada dan Perbengkelan	16
2.5.4 Unit BBM, Pabrik Es, dan Toserba	16
2.5.5 Lembaga Pemasaran	17
2.5.6 Peserta program Taksi Mina Bahari	18
3. METODOLOGI	
3.1 Obyek, Lokasi dan waktu	19
3.2 Metode	19
3.3 Penentuan Sampel	20
3.4 Pengumpulan Data	21
3.5 Analisa Data	23

4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis	24
4.2 Iklim	25
4.3 Keadaan Penduduk	25
4.4 Potensi Perikanan	28

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengelolaan dan Peranan lembaga pengelola Taksi Mina Bahari	30
5.2 Mekanisme Pelaksanaan Usaha Penangkapan Ikan Anggota Program Taksi Mina Bahari	40
5.2.1 Tahapan Untuk Melaut	42
5.2.2 Penanganan Ikan Diatas Kapal	43
5.2.3 Pembongkaran Hasil Tangkapan	43
5.2.4 Pemasaran Hasil Tangkapan	44
5.3 Respon Masyarakat Terhadap Program Taksi Mina Bahari	44
5.3.1 Respon Masyarakat Untuk Menjadi Anggota Taksi Mina Bahari	44
5.3.2 Respon Nelayan Anggota Taksi Mina Bahari Mengenai Angsuran Kredit	47
5.3.3 Respon Nelayan Anggota Mengenai Manfaat dari Program Taksi Mina Bahari	48
5.3.4 Respon Nelayan Anggota Taksi Mina Bahari Mengenai Tingkat Pendapatan	49

6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	51
6.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

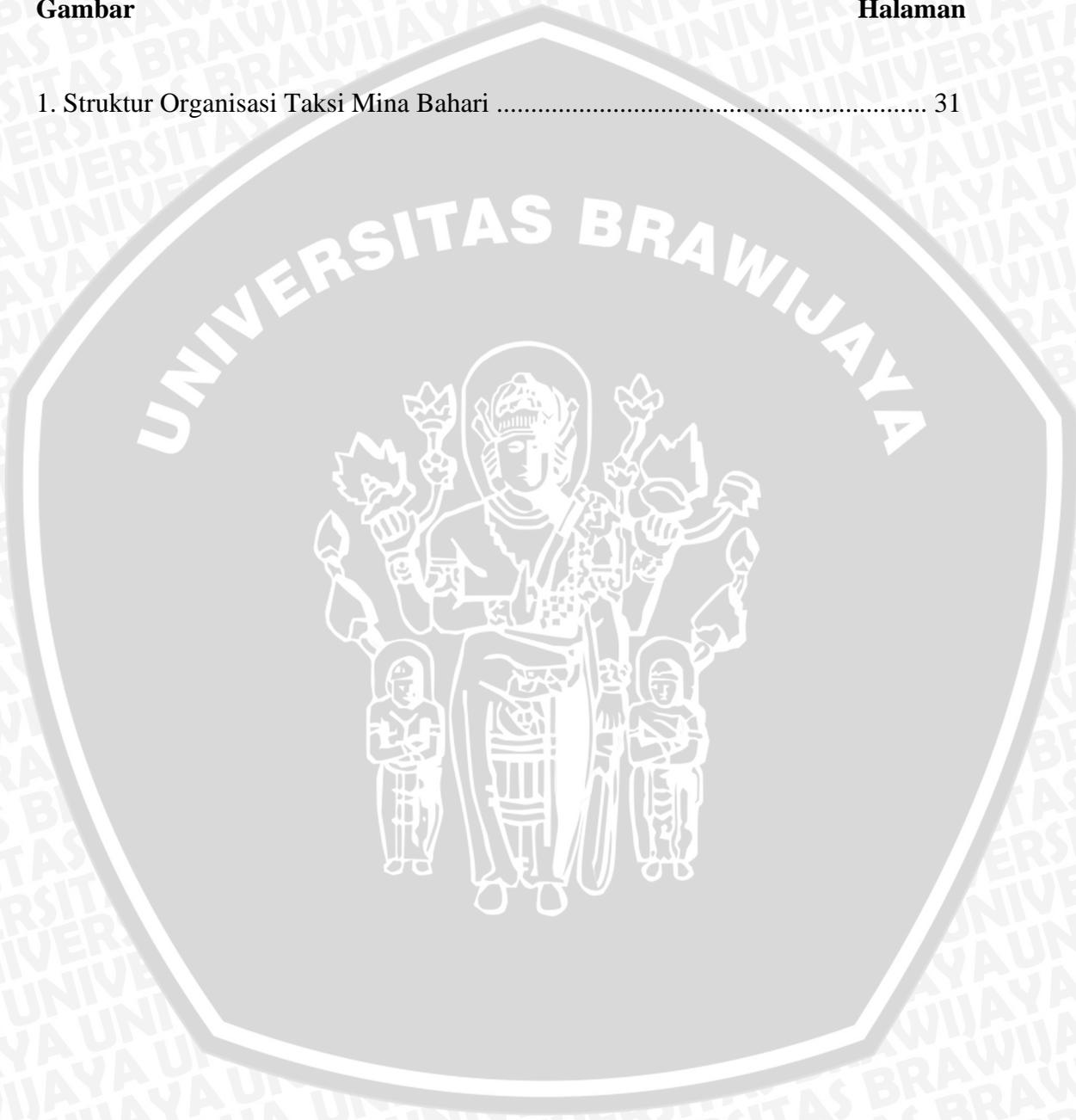
Tabel	Halaman
1. Distribusi dan kepadatan penduduk Kota Gorontalo	26
2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio Kota Gorontalo.....	26
3. Jumlah penduduk Kota Gorontalo yang bekerja menurut lapangan usaha	27
4. Jumlah produksi perikanan laut Kota Gorontalo menurut jenis ikan	29
5. Jumlah Realisasi Kredit Investasi Tahun 2004 – 2006	34
6. Jumlah Realisasi kredit Amprak Tahun 2004 – 2006	35
7. Data Jumlah Pemakaian BBM Nelayan Anggota TMB Tahun 2004 – 2007	37
8. Data Jumlah Kebutuhan Es Nelayan Anggota TMB Tahun 2004 – 2007	38
9. Jumlah Hasil Penjualan Barang di Toserba TMB	39
10. Jumlah Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Anggota Tahun 2004-2006	39
11. Jumlah Anggota Taksi Mina Bahari Tahun 2004 – 2006	45
12. Data Respon Nelayan Mengenai Persyaratan Menjadi Anggota TMB	46
13. Angsuran Kredit Investasi Anggota TMB unit Tenda Tahun 2004-2007	47
14. Angsuran Kredit Amprak anggota TMB unit Tenda Tahun 2004-2007	47
15. Data Responden nelayan mengenai angsuran kredit	48
16. Respon Nelayan Mengenai Manfaat Program TMB	49
17. Data Respon Nelayan Anggota mengenai peningkatan pendapatan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar

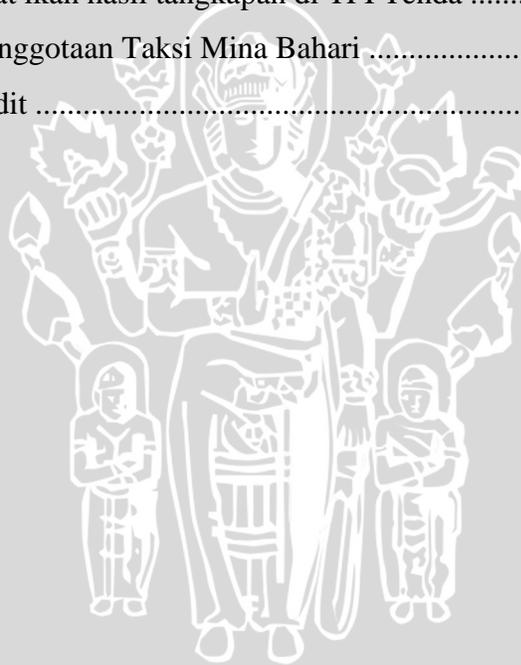
Halaman

1. Struktur Organisasi Taksi Mina Bahari 31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Lokasi penelitian	55
2. Foto Kantor Manajemen, unit waserda, unit BBM TMB Tenda	56
3. Foto unit pelayanan es dan salah satu armada penangkapan	57
4. Foto Kegiatan nelayan anggota TMB unit Tenda.....	58
5. Pembayaran kredit investasi dan amprak oleh anggota TMB di unit LKN	59
6. Kegiatan bongkar muat ikan hasil tangkapan di TPI Tenda	60
7. Format perjanjian keanggotaan Taksi Mina Bahari	61
8. Format perjanjian kredit	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia begitu melimpah dengan panjang garis pantai 81.000 km, dengan kekayaan sumberdaya laut yang ada semestinya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan pembudidaya ikan, namun pada kenyataannya masyarakat pesisir hingga kini masih terjebak dalam lingkungan kemiskinan. Kemiskinan yang melilit masyarakat nelayan hingga saat ini diibaratkan dengan tikus yang mati di lumbung padi. Mubyarto (1984) dalam Solihin A. (2005) menemukan data dan fakta bahwa kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan di wilayah Indonesia, khususnya yang berdominsili di daerah pesisir pantai lebih miskin dibanding dengan kelompok masyarakat lain.

Pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembangunan kawasan pesisir secara terpadu masih diyakini sebagai upaya ideal untuk megatasi berbagai persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan yang menumpuk di kawasan pesisir. Kunci keberhasilan program pembangunan untuk masyarakat pesisir dari berbagai jeratan kehidupan tersebut bertumpu pada kemampuan sumberdaya lokal, berorientasi membangun kemandirian internal masyarakat, adanya dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah dan keterlibatan pihak-pihak lain untuk mendorong dinamika pembangunan kawasan dan tanggung jawab bersama, kepedulian sosial, dan bersifat menguntungkan bagi semua pihak secara berkelanjutan (Kusnadi, M.A. 2006).

Diketahui bahwa fokus pembangunan bidang kelautan dan perikanan cukup luas, yakni terdiri berbagai sektor ekonomi. Namun selama ini, pembangunan yang memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tidak dilakukan oleh satu koordinasi lembaga negara, tetapi dilakukan secara parsial oleh beberapa lembaga negara setingkat departemen seperti departemen pertahanan, perhubungan, energi, pariwisata, industri dan perdagangan, kelautan dan perikanan, keuangan, lingkungan hidup dan kimpraswil (kependudukan dan imprastruktur wilayah) (Kusumastanto, T. 2003).

Tanggung jawab pembangunan kelautan dan perikanan tidak bisa sepenuhnya dipikul oleh departemen kelautan dan perikanan. Sebab, tolak ukur pembangunan kelautan dan perikanan harus dilihat dari kemajuan berbagai sektor ekonomi yang memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan. Untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai *leading sector* dalam pembangunan ekonomi, pendekatan kebijakan yang dilakukan harus mempertimbangkan keterkaitan antar sektor ekonomi dalam lingkup bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan melibatkan peran antar institusi pemerintah pusat dan daerah (Kusumastanto, T. 2003).

Arah pembangunan yang mengarah pada peningkatan *out put* semata harus ditingkatkan dan dikembangkan pada pembangunan yang memberikan nilai tambah (*added value*), kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dengan begitu kebijakan pembangunan ekonomi tidak didasarkan pada pemerasan pembangunan sektor lain namun didasarkan pada pemanenan yang paling efisien dari sektor laut yang memberikan kontribusi yang maksimal bagi bangsa, serta

mampu menjawab tantangan persaingan global dan pembangunan berkelanjutan (Solihin, A. dkk. 2005).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22/1999 tentang pemberian kewenangan yang sedemikian luas kepada daerah untuk mengembangkan dan mengelolah sumberdaya nasional yang berada di wilayahnya dan bertanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat 1. Penjelasan pasal 10 ayat 1 tersebut menguraikan bahwa yang dimaksud dengan sumberdaya nasional adalah sumberdaya alam (SDA), sumberdaya buatan (SDB) dan sumberdaya manusia (SDM) yang tersedia di daerah (Solihin, A. dkk. 2005).

Dalam era otonomi sekarang ini pemerintah daerah saling berlomba untuk mempercepat pembangunan disegala bidang atau sektor yang dianggap mampu untuk mempercepat peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang telah dikembangkan oleh pemerintah provinsi Gorontalo hingga saat ini adalah model pengembangan dan pembinaan usaha perikanan yang berbasis perikanan rakyat agar para nelayan dan pembudidaya ikan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang difasilitasi oleh pemerintah.

Model pembinaan usaha nelayan dan pembudidaya ikan yang ditawarkan adalah konsep pembinaan melalui pengembangan sistem produksi yang disebut pengelolaan Taksi Mina Bahari. Program pengelolaan usaha Taksi Mina Bahari adalah merupakan program implementasi dari sebelas model pengembangan “Etalase” kelautan dan perikanan provinsi Gorontalo. Program Taksi Mina Bahari ini

mengadopsi pengelolaan usaha transportasi taksi oleh koperasi taksi, maka pemerintah provinsi Gorontalo menawarkan sistem pengolahan usaha perikanan khususnya perikanan tangkap dan usaha budidaya untuk dikelola seperti usaha pertaksian dimana sopir (nelayan dan pembudidaya ikan) hanya memikirkan mencari dan memproduksi ikan sedang kegiatan lain seperti peralatan, perbekalan perbaikan kapal, penyediaan BBM, penyediaan sembilan bahan pokok dan pemasaran dilakukan dalam satu unit usaha tersendiri dalam satu manajemen tersendiri pula.

Dengan pengelolaan usaha perikanan melalui Taksi Mina Bahari diharapkan nelayan dan pembudidaya ikan dapat memenuhi sarana produksinya seperti kapal, alat tangkap, konstruksi tambak atau kolam yang diperoleh melalui kredit komersial dengan persyaratan lunak dengan tingkat bunga rendah yang disediakan oleh lembaga keuangan yang disediakan pemerintah khusus untuk program tersebut misalnya BPR Nelayan atau lembaga keuangan nelayan yang ditempatkan didaerah konsentrasi nelayan dan pembudidaya ikan.

1.2 Rumusan Masalah

Provinsi Gorontalo mempunyai garis pantai sepanjang 590 Km yang terdiri dari garis pantai bagian utara sepanjang 270 Km dan garis pantai bagian selatan sepanjang 320 Km, dengan luas perairan 50.500 Km² yang terdiri dari laut Sulawesi 3100 Km², perairan teluk Gorontalo 7400 Km² dan perairan ZEE 40.000 Km².

Potensi sumberdaya perikanan tangkap Provinsi Gorontalo sebesar 92.200 ton yang terdiri dari potensi perairan teritorial sebesar 46.200 ton dan potensi perairan

ZEE sebesar 46.000 ton. Potensi perikanan laut Gorontalo sebesar 10.675 ton. Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap baru mencapai 22,34%.

Sebagai salah satu sektor unggulan dari provinsi Gorontalo, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan perlu kajian, perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis dan terarah sehingga target pencapaian sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terwujud dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan serangkaian kajian dan pelaksanaan yang dilakukan oleh PKSPL-IPB Bogor dengan melahirkan 11 konsep pengembangan “Etalase Perikanan” dan Kelautan Kawasan Timur Indonesia di Gorontalo yang terdiri dari :

1. Model pengembangan perikanan tangkap.
2. Model pelabuhan perikanan.
3. Model pengembangan budidaya perikanan.
4. Model koservasi dan wisata bahari.
5. Model pengembangan sumberdaya manusia.
6. Model pengembangan desa nelayan.
7. Model Pembangunan pelabuhan udara cargo.
8. Model pengembangan marine industri.
9. Model pengembangan kota pantai.
10. Model pengembanganpulau-pulau kecil.
11. Model pengembangan energi.

Untuk mempercepat peningkatan Kesejahteraan masyarakat Pesisir Provinsi Gorontalo, maka potensi perikanan dan kelautan perlu dikelola secara optimal, lestari dan bertanggung jawab, karena saat ini dari potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh provinsi Gorontalo baru dimanfaatkan kurang dari 50%. Salah satu kendala untuk mengeksploitasi kekayaan laut dan perikanan yang kita miliki adalah keterbatasan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia baik kualitas maupun jumlahnya.

Untuk mengimplementasikan dan mempercepat sasaran pembangunan perikanan dan kelautan khususnya peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir pada umumnya, maka pembinaan usaha perikanan dan kelautan dilakukan melalui program Taksi Mina Bahari. Pembinaan usaha Taksi Mina Bahari diilhami dari sistem pengelolaan taksi (angkutan umum) yang saat ini banyak dilakukan di kota-kota besar, dimana para nelayan dan pembudidaya ikan hanya melakukan kegiatan proses produksi (menangkap dan membudidaya), sedangkan kegiatan penunjang lainnya seperti pemeliharaan kapal, perbaikan kolam, penyediaan BBM, penyediaan es dan kebutuhan sembako ditangani unit-unit usaha lainnya, dengan sistem Taksi Mina Bahari ini memerlukan dukungan finansial khususnya permodalan dan sumberdaya manusia yang memadai. Unit-unit tersebut antara lain lembaga keuangan mikro, klinik bisnis, galangan kapal, pabrik es, kios BBM, toserba dan insulated truk.

Untuk mengoptimalkan potensi perikanan yang ada di Provinsi Gorontalo, pemerintah setempat membuat suatu konsep pembinaan usaha perikanan melalui “Taksi Mina Bahari” agar potensi perikanan yang ada dapat dimanfaatkan secara

maksimal dan berkelanjutan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir pada umumnya, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dan peranan lembaga pengelola usaha “Taksi Mina Bahari Kota Gorontalo?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan usaha penangkapan ikan anggota “Taksi Mina Bahari”?
3. Bagaimana respon masyarakat yang mengikuti program pengelolaan usaha “Taksi Mina Bahari”?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengelolaan dan peranan lembaga pengelola usaha “Taksi Mina Bahari”.
2. Mekanisme pelaksanaan usaha penangkapan ikan anggota “Taksi Mina Bahari”.
3. Respon masyarakat yang mengikuti program pengelolaan usaha “Taksi Mina Bahari”.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain bagi :

1. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan program untuk mensejahterakan masyarakat pesisir.
2. Pengusaha, sebagai bahan informasi sebelum pengusaha menanamkan modalnya.
3. Perguruan Tinggi, sebagai bahan informasi ilmiah untuk melakukan kajian lebih lanjut yang berhubungan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembinaan Masyarakat Pesisir

Berdasarkan aspek geografis, masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir. Mereka menggantungkan kelangsungan hidupnya dari upaya mengelola sumberdaya alam yang tersedia di lingkungannya, yakni di kawasan pesisir, perairan (laut) dan pulau-pulau kecil. Sumberdaya perikanan merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Karena itu, sumberdaya perikanan mengambil peranan yang besar sebagai penggerak dinamika ekonomi lokal di desa-desa pesisir (Kusnadi, M.A. 2006).

Di era reformasi ini, kelompok masyarakat yang bermungkin di wilayah pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan pembudidaya ikan sudah selayaknya untuk mendapatkan garansi atas rencana pembangunan pada masa mendatang. Pembangunan yang dilaksanakan selama lebih dari tiga dasawarsa, secara ekonomi, ternyata hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat bermodal. Sebaliknya kelompok masyarakat pesisir terutama yang bermungkim di wilayah pesisir adalah kelompok masyarakat yang paling menderita dengan taraf kesejahteraan yang jauh dibawah kelompok masyarakat lainnya (Solihin, A. dkk, 2005).

Persoalan pembangunan masyarakat pesisir dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) masalah sosial yang mencakup kemiskinan, kesenjangan sosial dan konflik sosial nelayan; (2) masalah lingkungan yang mencakup isu kerusakan ekosistem pesisir laut, pulau-pulau kecil dan kelangkaan sumberdaya perikanan; serta (3) masalah modal pembangunan yang mencakup isu pengelolaan potensi sumberdaya yang belum optimal dan masalah kepunahan desa nelayan atau surutnya peranan ekonomi desa nelayan beserta tradisi maritimnya. Ketiga masalah itu saling terkait dalam konteks relasi kausalitas (Kusnadi, M.A. 2006).

Persoalan inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian DKP dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir. Semestinya ada instrumen kebijakan yang mampu secara efektif mengurangi (kalau tidak dapat menghilangkan) sistem sosial yang tidak memungkinkan nelayan kecil keluar dari lingkungan kemiskinan, seperti menciptakan skenario baru dalam pengembangan rekayasa sosial serta model-model pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, jangan melakukan metamorfosis program-program pemberdayaan seperti IDT, P3DT, JPS dan sejenisnya yang pendekatannya melalui pola proyek sehingga banyak anggaran yang manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan masyarakat pesisir dan program terputus karena faktor administrasi proyek (Kusumastanto, T. 2003).

2.2 Konsep Pembinaan Masyarakat Pesisir

Konsep pembinaan masyarakat pesisir dalam rangka perspektif pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia perlu dikaji secara baik, tepat dan menyentu sasaran yang ingin dicapai. Hal ini berkaitan dengan beberapa faktor yang melingkupi

seperti pembinaan nelayan yang melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, lembaga-lembaga nonpemerintah maupun masyarakat nelayan sendiri. Selain itu, proses pembinaan juga harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan masyarakat nelayan. Dengan demikian bisa menghasilkan perubahan-perubahan yang sesuai dengan tujuan pembangunan perikanan yang diharapkan (Kusumastanto T. 2003).

Menurut Agoes. W. P (2005), pembinaan masyarakat pesisir sebagai proses penyuluhan dan pendidikan nonformal dapat diartikan sebagai lima bentuk yaitu :

1. Pembinaan masyarakat nelayan merupakan suatu proses penyebarluasan informasi yang diperlukan dan berkembang selama pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan.
2. Pembinaan masyarakat nelayan merupakan proses penerangan. Penerangan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang belum diketahui dengan jelas untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan yang ingin dicapai melalui proses pembangunan perikanan.
3. Pembinaan sebagai proses perubahan perilaku. Terjadinya perubahan perilaku dikalangan masyarakat pesisir berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir.
4. Pembinaan merupakan proses pendidikan. Hal ini dimaksudkan memiliki ciri bahwa sistem pendidikan non formal yang terencana dapat dilakukan dimana saja baik di dalam maupun di luar ruangan.

5. Pembinaan merupakan proses rekayasa sosial dimana perlu dilaksanakan secara bijak dan hati-hati serta harus dijaga. Maksudnya, agar tidak terperangkap kepada upaya tercapainya tujuan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat pesisir yang sebenarnya ingin memperbaiki mutu hidupnya.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Otonomi Daerah

Otonomi daerah di wilayah laut juga akan memiliki makna pembebasan dan pemberdayaan bagi masyarakat pesisir serta perlindungan lingkungan alam laut, jika masyarakat diberikan kembali haknya (*re-entitle*) dalam menguasai dan mengelola sumber daya sektor perikanan secara kolektif dan partisipatif (Kusumastanto T. 2003).

Otonomi daerah yang sedang berjalan saat ini, pemerintah daerah harus mampu membangkitkan partisipasi masyarakat daerah di wilayah laut, khususnya nelayan dan petani ikan yang selama ini terpinggirkan dan termarginalisasikan. Partisipasi yang dimaksud terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah (Agoes. W. P. 2005).

Menuru Kusumastanto T (2003), pentingnya partisipasi masyarakat masyarakat dalam pembangunan di landasi oleh:

1. Partisipasi masyarakat pesisir khususnya nelayan dan petani ikan merupakan instrumen untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Ini menekankan bahwa tanpa kehadiran masyarakat pesisir, program yang dikembangkan akan gagal.

2. Masyarakat pesisir akan lebih mempercayai program yang dikembangkan dalam bidang yang terkait langsung dengan kepentingan mereka. Keterlibatan mereka dalam proses persiapan dan perencanaan sampai implementasi membuat mereka mengetahui selubuk program tersebut dan bahkan merasa memilikinya.
3. Hal ini akan mendorong terciptanya partisipasi secara umum (*common participation*) masyarakat pesisir dalam pembangunan karena tercipta persepsi yang kondusif bahwa partisipasi mereka merupakan “hak demokrasi” untuk menunjang proses pembangunan itu sendiri.

2.4 Program Taksi Mina Bahari

Taksi Mina Bahari merupakan usaha pengelolaan usaha perikanan dan kelautan yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai salah satu model pengembangan Etalase Perikanan dan Kelautan Kawasan Timur Indonesia. Pembinaan usaha perikanan melalui Taksi Mina Bahari dicetuskan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo pada November 2003, setelah melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi karyawan, manajemen Taksi Mina Bahari terbentuk pada bulan Juni 2004 dan mulai beroperasi pada akhir bulan juli 3 (tiga) lokasi yaitu Site Manajemen Taksi Mina Bahari Unit Tenda kota Gorontalo, Site Manajemen Taksi Mina Bahari Unit Kwandang Kabupaten Gorontalo dan Site Manajemen Taksi Mina Bahari Unit Tabulo Kabupaten Boalemo. Pengertian Taksi Mina Bahari yang terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu: Taksi yang berarti sarana transportasi umum sedang Mina berarti ikan baik laut, payau maupun tawar dan

Bahari adalah laut. Sehingga Pengertian dari Taksi Mina Bahari adalah pengelolaan usaha perikanan dengan manajemen usaha taksi, baik yang dikelola secara perorangan maupun yang dikelola oleh koperasi.

Pembinaan usaha perikanan melalui Taksi Mina Bahari dimaksudkan untuk memudahkan nelayan dan pembudidaya ikan untuk memperoleh fasilitas kelancaran dalam mengelolah usaha perikanan baik melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan pemerintah lainnya dengan tujuan agar memacu peningkatan pendapatata nelayan sehingga kesejahteraan lebih baik.

Maksud pengelolaan usaha perikanan dengan model Taksi Mina Bahari adalah untuk mengembangkan sejumlah usaha perikanan yang semula dilakukan secara perorangan menjadi suatu usaha bersama yang dikelola secara integral dalam hal penyiapan faktor produksi perikanan. Kondisi demikian akan memberikan kemudahan bagi para nelayan dalam berusaha sehingga diharapkan akan lebih cepat berkembang, maju dan mandiri.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam pengelolaan Taksi Mina Bahari adalah :

1. Mengembangkan usaha perikanan secara perorangan yang kurang produktif menjadi lebih produktif sehingga akan dapat meningkatkan produksi perikanan.
2. Meningkatkan manajemen usaha perikanan yang dilaksanakan secara tradisional menjadi moderen.
3. Meningkatkan efisiensi usaha perikanan sehingga meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan.

2.5 Kelembagaan Taksi Mina Bahari

2.5.1 Lembaga Keuangan Nelayan

Untuk akses permodalan, pemerintah melalui DKP sebenarnya telah melakukan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir berdasarkan kebijakan KepMen 41 Tahun 2000 Departemen Kelautan dan Perikanan tentang permodalan umum yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Tujuannya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Raharja dan Manurung (2004), lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) kepada pihak yang membutuhkan dana (unit devisa). Sedangkan menurut Kasmir (2002) Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dalam dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Lembaga keuangan yang memberikan modal kepada peserta program Taksi Mina Bahari didirikan oleh pemerintah daerah sebagai pemilik saham yang terbesar. Lembaga keuangan ini berkewajiban memberi kredit kepada nelayan dan pembudidaya ikan yang mekanismenya akan diatur lebih lanjut oleh instansi teknis yang terkait lembaga ini diberi nama Lembaga Keuangan Nelayan (LKN).

2.5.2 Lembaga Penjamin Usaha/Kredit

Lembaga penjamin ini adalah perusahaan perikanan atau lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Lembaga ini bertugas untuk membantu

nelayan dan pembudidaya ikan peserta Taksi Mina Bahari dalam mengelola usahanya serta memberikan bimbingan usaha mulai dari penyiapan proposal, pengajuan kredit pelaksanaan dan pengelolaan teknis usaha sampai pada usaha pemasaran. Lembaga ini juga berfungsi sebagai KLINIK BISNIS yang akan membantu nelayan dan pembudidaya ikan dalam aspek usaha dan bisnis perikanan serta sebagai penjamin kredit bagi peserta Taksi Mina Bahari.

2.5.3 Unit Armada dan Perbengkelan

Unit armada dan perbengkelan ini dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah peralatan, perbaikan kapal dan alat tangkap bagi nelayan serta melakukan rehabilitasi dan perbaikan terhadap kolam, tambak dan sarana budidaya bagi pembudidaya ikan dengan unit perawatan perbengkelan Taksi Mina Bahari ini diharapkan para nelayan dan pembudidaya ikan hanya berpikir menangkap dan memelihara ikan, sedangkan perawatan dan perbaikan sarana produksi nelayan dan pembudidaya ikan serta pemasarannya menjadi tanggung jawab unit perawatan dimaksud.

2.5.4 Unit BBM, Pabrik Es, dan Toserba

Unit BBM dan pabrik es bertugas menyediakan BBM untuk melaut dan es untuk penyimpanan/pengawetan ikan di kapal dan di tambak. Unit ini juga menyediakan kebutuhan sembako bagi nelayan peserta Taksi Mina Bahari serta juga melayani pembudidaya ikan dan masyarakat umum lainnya. Untuk unit ini perlu dilengkapi dengan pabrik es dan sarana suplayer BBM serta toko serba ada.

2.5.5 Lembaga Pemasaran

Lembaga pemasaran yang bertanggung jawab untuk menampung dan memasarkan hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan adalah badan usaha milik negara bidang perikanan yaitu PT. Usaha Mina cabang Gorontalo. Sistem pemasaran hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan peserta Taksi Mina Bahari diberlakukan dengan sistem pemasaran terbuka/umum dan dibayar tunai. Lembaga pemasaran ini dilengkapi dengan insulated refrigerated truck paling sedikit 3 (tiga) unit.

2.6 Peserta program Taksi Mina Bahari

Peserta dari program Pembinaan Taksi Mina Bahari adalah nelayan, pembudidaya ikan dan pengusaha perikanan yang digolongkan menjadi:

1. Penerima paket

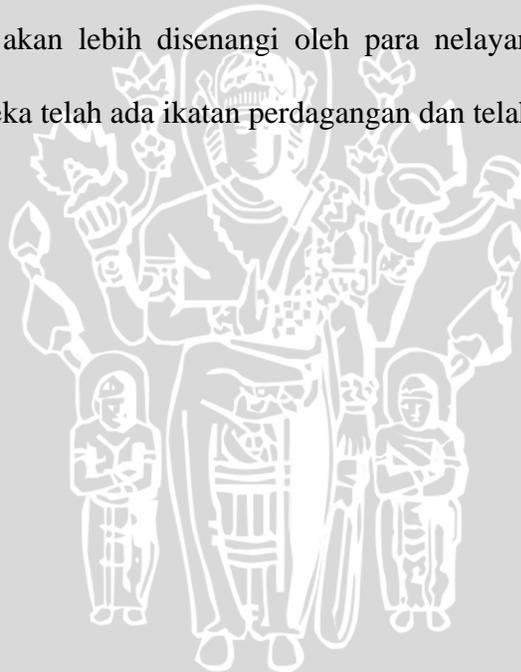
Peserta yang memanfaatkan sarana produksi yang diberikan melalui fasilitas bergulir, paket bantuan, kredit dari lembaga keuangan nelayan (LKN). Dada dasarnya peserta Taksi Mina Bahari adalah bersifat perorangan. Penentuan peserta diambil dari anggota kelompok nelayan dan pembudidaya ikan yang berprestasi serta bertanggung jawab. Pada sektor penangkapan apabila unit penangkapan (kapal) yang diberikan melalui fasilitas kredit telah dilunasi maka kapal tersebut akan menjadi milik pribadinya.

2. Nelayan

Peserta yang telah memiliki sarana produksi sendiri alat tangkap, kolam dan tambak, peserta kategori ini mempunyai kewajiban membayar manajemen fee kepada pengelola sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh manajemen Taksi Mina Bahari.

3. Pedagang Ikan

Peserta yang telah bergerak dalam perdagangan hasil perikanan baik lokal maupun antar daerah/pulau. Dengan masuknya pedagang ikan kedalam organisasi Taksi Mina Bahari ini akan lebih disenangi oleh para nelayan/pembudidaya ikan mengingat diantara mereka telah ada ikatan perdagangan dan telah saling percaya.



BAB III

METODOLOGI

3.1 Obyek, Lokasi dan waktu

Penelitian ini dilakukan dengan obyek penelitian adalah program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program “Taksi Mina Bahari” yang berlokasi di kawasan pesisir Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada bulan Juli sampai Agustus 2007. Pesisir kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah pengembangan perikanan dan kelautan di provinsi Gorontalo, karena lokasi ini mempunyai sarana dan prasarana yang sangat menunjang untuk keberhasilan dari program “Taksi Mina Bahari” seperti adanya pelabuhan perikanan, organisasi pengelola yang tersusun dengan baik. Lokasi ini sangat mudah dijangkau karena letaknya tidak jauh dari ibu kota provinsi sehingga memudahkan untuk melakukan pemasaran. Adapun sasaran dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan program Taksi Mina Bahari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

3.2 Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik survai. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau kendala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak memerlukan administrasi atau pengontrolan terhadap perlakuan.

Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem sistem pemikiran ataupun suatu kelas penelitian pada masa sekarang. Sedangkan menurut Widodo dan Mukhtar (2002), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas luas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1985), penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Sedangkan menurut Nazir (1988), Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.

3.3 Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dan dipergunakan untuk memenuhi sifat secara ciri-ciri yang dikehendaki dari sifat populasi. Tujuan dari penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi. Tujuan lain dari penentuan sampel yaitu untuk menemukan sifat umum dari populasi untuk menarik generalisasi dari suatu penelitian.

Dalam penelitian ini pengambilan sampelnya adalah sensus, dimana populasi sampel yang akan didata kurang dari 100. Seperti yang dijelaskan oleh Singarimbun (1981), yaitu jika populasi kurang dari 100 maka pengambilan sampelnya adalah berupa sensus yaitu pengambilan sampel dari keseluruhan populasi yang ada. Hal ini juga dapat menambah kebenaran dari pengujian data.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah lembaga pengelola yaitu manajemen Taksi Mina Bahari Unit Tenda, dan nelayan yang menjadi anggota program Taksi Mina Bahari yang berjumlah 30 kelompok.

3.4 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (Kusnadi, 1993). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung (Marzuki, 2002). Observasi adalah cara pengambilan data melalui tindakan pengamatan secara langsung dengan melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Data-data tersebut dapat diperoleh dari instansi atau lembaga-lembaga yang berhubungan dengan obyek yang ada dalam penelitian. Sedangkan wawancara langsung adalah melakukan tanya jawab langsung kepada responden sebagai obyek penelitian untuk memperoleh keterangan dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guid*) (Nazir M, 1985).

Jenis data primer yang diambil meliputi :

- Tujuan dilaksanakannya program Taksi Mina Bahari.
- Struktur organisasi.
- Sarana dan prasarana penunjang program Taksi Mina Bahari.
- Respon nelayan yang mengikuti program ini.
- Pengelolaan dan peranan Taksi Mina Bahari.
- Mekanisme usaha penangkapan ikan anggota Taksi Mina Bahari.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada seperti laporan instansi terkait, jurnal dan studi kepustakaan yang dapat menunjang penelitian. Menurut Kasiadi (1993) data sekunder telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, sedangkan menurut Marzuki (2002), data sekunder adalah data yang tidak diusahakan sendiri oleh peneliti

Jenis data sekunder yang dikumpulkan antara lain :

- Keadaan umum lokasi penelitian (Kondisi geografisnya).
- Penduduk (Jumlah penduduk, jenis kelamin, kondisi sosial).
- Usaha perikanan di daerah penelitian (Jenis usaha, jumlah unit usaha).

Sumber data sekunder ini adalah dari :

- Kantor Departemen Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
- Kantor Badaan Pusat Statistik Kota Gorontalo.
- Keterangan atau publikasi lainnya.
- Kepustakaan.

3.5 Analisa Data

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif adalah analisa data yang sifatnya kualitatif tanpa menggunakan perhitungan-perhitungan, analisa ini dilakukan untuk menjelaskan:

1. Peranan lembaga pengelola usaha Taksi Mina Bahari terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
2. Mekanisme pelaksanaan usaha penangkapan ikan anggota program Taksi Mina Bahari.
3. Respon masyarakat yang mengikuti program pengelolaan usaha Taksi Mina Bahari.

Menerut Moleong J Lexy (1995), analisa kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang bersifat interaktif yaitu :

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
2. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data , maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya.

BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis dan Topografi

Kota Gorontalo merupakan Ibu Kota dari Povinsi Gorontalo, Kota Gorontalo berada pada posisi $00^{\circ} 28' 17''$ – $000 35' 56''$ Lintang Utara $122^{\circ} 59' 44''$ – $123^{\circ} 05' 59''$ Bujur Timur. Kota Gorontalo memiliki 6 kecamatan yaitu: Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Kota Duingi, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Utara dan Kecamatan Kota Tengah. Luas wilayah daratan Kota Gorontalo $64,79 \text{ km}^2$ atau sekitar 0,53% dari luas Provinsi Gorontalo. Adapun batas wilayah Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone-Bolango.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga dan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

Kondisi topografi Kota Gorontalo adalah tanah datar yang dilalui tiga buah sungai yang bermuarah di teluk Tomini. Bagian selatan diapit dua pegunungan berbatu kapur. Kota Gorontalo merupakan dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0-500 meter. Pesisir pantai Kota Gorontao landai dan berpasir.

4.2 Iklim

Keadaan iklim Kota Gorontalo yaitu Tropis, dengan kelembaban udara relatif tinggi rata-rata 80,5% dan temperatur udara di Kota Gorontalo pada siang hari rata-rata 32,3⁰C, sedangkan suhu udara pada malam hari rata-rata 23,5⁰C. Kota Gorontalo dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di wilayah Kota Gorontalo, pada bulan Oktober sampai bulan April arus angin berasal dari barat yang banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim penghujan dengan curah hujan berkisar antara 17 mm sampai dengan 223 mm sedangkan pada bulan Juni sampai bulan september arus angin yang berasal dari timur yang tidak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Keadaan seperti itu terjadi setiap tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan Mei dan Oktober.

4.3 Penduduk

Jumlah penduduk Kota Gorontalo pada tahun 2005 tercatat sebanyak 156.390 jiwa yang penyebarannya belum merata di 6 Kecamatan, 22,08% terdapat di Kecamatan Kota Selatan, 25,06% terdapat di Kecamatan Kota Timur, 11,78% terdapat di Kecamatan Kota Barat, 10,57% terdapat di Kecamatan Duingi dan 12,74% terdapat di Kecamatan Kota Utara, 12,77% terdapat di Kecamatan Kota Tengah, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 2,414 jiwa perkilometer persegi. Distribusi dan kepadatan penduduk Kota Gorontalo disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi dan kepadatan penduduk Kota Gorontalo.

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Persentase penduduk (%)	Luas km ²	Kepadatan Per km ²
1	Kota Barat	18.419	11,78	15,16	1.215
2	Dungingi	16.529	10,57	4,10	4.031
3	Kota Selatan	34.535	22,08	14,39	2.400
4	Kota Timur	39.191	25,06	14,43	2.716
5	Kota Utara	27.748	17,74	12,58	2.716
6	Kota Tengah	19.968	12,77	4,13	4.835
	Jumlah	156.390	100.00	64,79	2.414

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Tahun 2005.

Sex ratio penduduk Kota Gorontalo pada tahun 2005 rata-rata 94,98% dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 76.182 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 80.208 jiwa. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio Kota Gorontalo disajikan secara rinci dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio Kota Gorontalo.

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio (%)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kota Barat	8.975	9.444	18.419	95,03
2	Dungingi	8.051	8.478	16.529	94,96
3	Kota Selatan	16.823	17.712	34.535	94,98
4	Kota Timur	19.089	20.102	39.191	94,96
5	Kota Utara	13.515	14.233	27.748	94,96
6	Kota Tengah	9.729	10.239	19.968	95,02
	Jumlah	76.182	80.208	156.390	94,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Tahun 2005.

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang berusia diatas 10 tahun adalah 124.350 jiwa terdiri dari laki-laki 59.520 jiwa dan perempuan 64.830 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk diatas 10 tahun yang masuk kategori kerja adalah 69.996 jiwa yang terdiri dari mereka yang bekerja sebanyak 56.440 jiwa dan yang berstatus pengangguran 13.556 jiwa. Menurut lapangan usaha penduduk Kota Gorontalo paling banyak bekerja pada sektor jasa sebanyak 19.332 jiwa dan sektor perdagangan sebanyak 12.882 jiwa. Jumlah penduduk Kota Gorontalo yang bekerja menurut lapangan usaha disajikan secara rinci dalam Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah penduduk Kota Gorontalo yang bekerja menurut lapangan usaha.

No	Lapangan Usaha	Tenaga Kerja		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1	Pertanian	4.936	62	4.998
2	Pertambangan	1.294	62	1.356
3	Industri	3.216	1.100	4.316
4	Listrik Gas dan Air	248	62	310
5	Konstruksi	3.416	302	3.718
6	Perdagangan	7.050	5.832	12.882
7	Transportasi dan Komunikasi	6.944	372	7.366
8	Keuangan	1.178	806	2.984
9	Jasa	9.918	9.414	19.332
10	Lainnya	-	178	178
Jumlah		38.250	18.190	56.440

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Tahun 2005

4.4 Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Kota Gorontalo ada 2 yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Potensi perikanan laut lebih maju dibandingkan dengan potensi perikanan darat, ini dikarenakan daerah untuk usaha perikanan darat sangat kurang adapun usaha perikanan darat dikelola secara tradisonal dan hanya dilakukan oleh sebahagian kecil oleh masyarakat Kota Gorontalo yaitu budidaya ikan air tawar di dalam karamba, tempat yang digunakan untuk budidaya ini memanfaatkan daerah aliran sungai, kegiatan usaha budidaya ini berada di Kecamatan Kota Utara. Dalam budidaya ini jenis ikannya antara lain ikan mas (*Cyprinus carpio*) dan ikan nila (*Oreocromus nilaticus*). Pada tahun 2005 propdusi ikan mas sebesar 2.450 ekor sedangkan produksi ikan nila sebesar 36.850 ekor.

Untuk potensi perikanan laut Kota Gorontalo jumlah produksinya dari tahun ketahun mengalami peningkatan produksi. Pada tahun 2005 jumlah produksi mencapai 6.406 ton, peningkatan ini dibarengi dengan naiknya nilai produksi perikanan laut sebesar 5,7% dari Rp. 33.945.000 pada tahun 2004 menjadi Rp. 36.012.200 pada tahun 2005. Jumlah produksi perikanan laut Kota Gorontalo menurut jenis ikan disajikan secara rinci dalam Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah produksi perikanan laut Kota Gorontalo menurut jenis ikan

No	Jenis Ikan	Jumlah Produksi (Ton)				Persentase Peningkatan produksi Tahun 2004-2005 (%)
		2002	2003	2004	2005	
1	Layang	1.461	2.112	2.312	2.362	2,1
2	Tuna	947	1.221	921	1.046	13,5
3	Cakalang	711	1.005	955	1.010	5,7
4	Tongkol	546	919	843	1.019	20,8
5	Selar	310	455	546	551	0,9
6	Ikan Lain-lain	521	425	506	516	1,9
Jumlah		4.498	6.137	6.083	6.504	6,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Tahun 2005

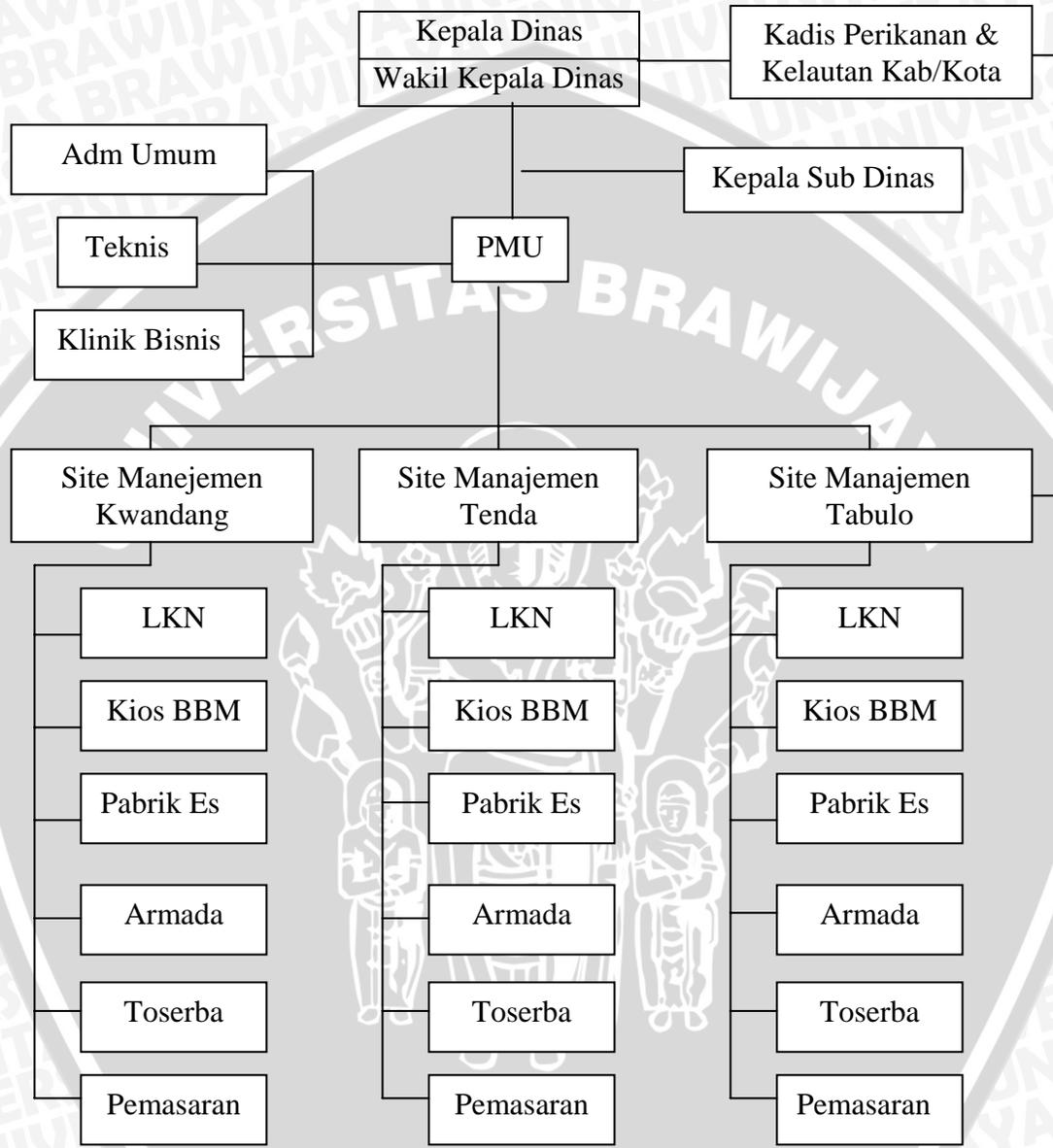
BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengelolaan dan Peranan Lembaga Pengelola Usaha Taksi Mina Bahari

Pelaksanaan program Taksi Mina Bahari memerlukan organisasi pengarah atau pembina, organisasi mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai tingkat Desa. Dalam pelaksanaan program Taksi Mina Bahari, Dinas perikanan dan kelautan selaku penanggung jawab. Dinas perikanan dan kelautan menunjuk personil pelaksana dibawahnya yang disebut *Project Managemen Unit* (PMU) yang dipimpin oleh seorang manejer yang dibantu oleh kepala urusan adimistrasi, kepala urusan teknis dan klinik bisnis. PMU bertanggung jawab langsung kepada pimpinan proyek/kepala Dinas perikanan dan kelautan. Pada tingkat pelaksanaan di lapangan dibentuk *site manejemen* unit pada masing-masing lokasi pelaksanaan program Taksi Mina Bahari yang dipimpin oleh seorang manejer dan sering juga disebut manejer Taksi Mina Bahari, dimana *site manejemen* ini membawahi beberapa unit usaha meliputi unit lembaga keuangan, unit armada kapal, unit BBM, unit pabrik es, unit toserba dan unit pemasaran. Struktur organisasi Taksi Mina Bahari secara rinci disajikan dalam gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Taksi Mina Bahari.



Sumber : Data Base TMB Tahun 2007

Pihak pengelola dituntut harus mampu dalam hal manajerial serta menguasai teknologi yang berhubungan dengan ilmu perikanan yang sesuai dengan kaidah-kaidah nasional maupun internasional (SSI, GMP, HACCP, PMMT, ISO), selain itu pengelola harus mempunyai pangsa pasar yang terjamin dan pasti.

Lembaga Pengelola Taksi Mina Bahari mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti:

1. *Project Managemen Unit (PMU).*

Project Managemen Unit atau manajer utama adalah penanggung jawab secara keseluruhan atas keberhasilan dari program-program Taksi Mina Bahari dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Tugas dari *Project Managemen Unit* adalah mengelola dan mengawasi langsung setiap kegiatan unit pelayanan Taksi Mina Bahari, membuat kerjasama dengan pihak lain dalam bidang pemasaran maupun teknis dengan sepengetahuan penanggung jawab program. Manajer umum mengkoordinasikan seluruh layanan dan program kerja manajemen Taksi Mina Bahari di setiap unit pelayanan dan membuat laporan bulanan, semester dan tahunan secara tertulis kepada Kepala Dinas perikanan dan kelautan Provinsi Gorontalo selaku penanggung jawab dari proyek pengelolaan usaha Taksi Mina Bahari.

2. *Site Manajemen.*

Site manajemen dikelola oleh lembaga perikanan yang berada di lokasi tempat pelaksanaan program Taksi Mina Bahari. Lembaga ini dipimpin oleh seorang manajer yang bertugas untuk mengawasi unit-unit pelayanan yang menyediakan sarana dan

prasarana bagi nelayan dalam melaksanakan kegiatannya, memberikan bimbingan teknis dan non teknis kepada unit-unit pelayanan usaha dibawahnya dan melakukan sosialisasi dan pembinaan langsung dengan nelayan dan anggota Taksi Mina Bahari.

Dalam melaksanakan tugas dilapangan dalam bidang oprerasional manajemen site manajemen berkordinasi dengan lembaga klinik bisnis dalam hal mengidentifikasi nelayan yang akan menjadi anggota serta mengevaluasi permohonan anggota untuk mendapatkan kredit. Site manajemen memberikan laporan secara berkala kepada pihak manajer utama sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugasnya.

3. Lembaga Keuangan Nelayan (LKN).

Lembaga keuangan nelayan berfungsi sebagai bank perkreditan rakyat yang dapat melayani kebutuhan permodalan usaha nelayan yang menjadi anggota program Taksi Mina Bahari. Bantuan permodalan melalui pemberian kredit lunak dengan tingkat bunga yang rendah. Lembaga keuangan nelayan mengeluarkan 2 (dua) bentuk kredit yaitu Kredit Investasi dan kredit Amprak atau kredit modal kerja.

Untuk memperoleh kredit dari pihak manajemen Taksi Mina Bahari anggota harus memberikan anggunan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan berupa surat-surat berhaga. Adapun cara untuk mendapatkan kredit yaitu anggota membuat surat permohonan untuk mendapatkan kredit kepada pihak manajemen, selanjutnya site manajemen dibantu oleh lembaga klinik bisnis melakukan penilaian kelayakan dari anggota yang akan mendapatkan fasilitas kredit, apabila permohonan kredit dari anggota dinilai layak atau diterima oleh site manajemen dan lembaga klinik bisnis

maka unit pelayanan lembaga keuangan membuat administrasi kredit yang terdiri dari surat persetujuan permohonan kredit, perjanjian kredit dan tanda terima jaminan kredit. Setelah semuanya beres maka lembaga keuangan nelayan melakukan proses pencairan kredit.

Anggota yang telah melunasi kredit dan ingin mendapatkan bantuan kredit lagi maka anggota tersebut boleh langsung mengajukan permohonan lagi kepada pihak manajemen dan bila ada anggota yang tidak dapat melunasi kredit yang diberikan oleh pihak manajemen maka pihak manajemen berhak atas pengalihan hak milik atau menjual harta benda yang dijaminan oleh para anggota.

Kredit investasi merupakan kredit yang dikeluarkan oleh manajemen Taksi Mina Bahari berupa pengadaan perahu, mesin, dan alat tangkap bagi nelayan yang telah menjadi anggota. Jumlah realisasi kredit investasi untuk anggota Taksi Mina Bahari secara rinci disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Realisasi Kredit Investasi Tahun 2004 - 2006.

No	Tahun	Realisasi kredit investasi (Rp)
1	2004	78.265.000
2	2005	213.925.000
3	2006	64.200.000
	Jumlah	356.390.000

Sumber: Data Base TMB Unit Tenda tahun 2007.

Kredit amprak merupakan kredit berupa pengadaan kebutuhan nelayan untuk melaut seperti BBM, es dan sembako. Jumlah realisasi kredit amprak untuk anggota Taksi Mina Bahari secara rinci disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Realisasi kredit Amprak Tahun 2004 – 2006.

No	Tahun	Realisasi kredit Amprak (Rp)
1	2004	75.220.877
2	2005	486.803.902
3	2006	528.714.950
	Jumlah	324.226.775

Sumber: Data Base TMB Unit Tenda tahun 2007.

4. Lembaga Klinik Bisnis.

Lembaga klinik bisnis berfungsi untuk membantu nelayan anggota Taksi Mina Bahari dalam menjalankan usahanya serta ikut membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi anggota dalam mengelola usahanya termasuk mendampingi anggota Taksi Mina Bahari untuk mendapatkan fasilitas kredit pada unit pelayanan lembaga keuangan nelayan, bentuk pelayanan lembaga klinik bisnis ini lebih banyak dalam bentuk jasa dan konstultasi berupa informasi tentang teknik usaha perikanan dan informasi pelayanan kredit. Lembaga ini juga bertugas untuk mendampingi site manajemen dalam hal penerimaan anggota serta mengevaluasi permohonan anggota untuk memperoleh kredit.

5. Unit Armada, Galangan Kapal .

Unit armada dimaksudkan untuk melayani masalah-masalah kerusakan peralatan, perbaikan kapal, dan alat-alat tangkap bagi nelayan anggota dan juga bagi masyarakat umum. Nelayan anggota maupun masyarakat umum mengajukan

permintaan perbaikan atau pelayanan dengan mengisi nota perbaikan atas persetujuan site manejer, kemudian nota tersebut dibawa ke unit armada, galangan kapal untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan. Biaya perbaikan atau perawatan bagi anggota Taksi Mina Bahari dibayar setelah melakukan kegiatan produksi sedangkan nelayan yang bukan anggota atau masyarakat umum dibayar langsung setelah perbaikan atau perawatan.

6. Unit Suplayer BBM.

Unit suplayer BBM ini bertanggung jawab terhadap kebutuhan bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah dan minyak plumas untuk melaut, selain diperuntukkan untuk nelayan yang mengikuti program Taksi Mina Bahari unit ini juga melayani kebutuhan masyarakat umum. Mekanisme kerja di unit suplayer BBM yaitu Nelayan anggota atau masyarakat umum mengajukan permintaan BBM dengan mengisi nota BPB (bukti permintaan barang) dengan persetujuan dari site manejer, kemudian nota tersebut dibawa keunit pelayanan BBM untuk mengambil BBM. Harga pejualan disesuaikan dengan harga pasar yang ada, untuk nelayan anggota pembayaran dilakukan dengan cara kredit atau dibayar setelah selesai melakukan kegiatan produksi sedangkan untuk masyarakat umum diwajibkan untuk membayar langsung pada saat pelayanan. Jumlah pemakaian BBM oleh anggota Taksi Mina Bahari secara rinci disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Data Jumlah Pemakaian BBM Nelayan Anggota TMB Tahun 2004 – 2007

No	Tahun	BBM (liter)	
		Bensin	Solar
1	2004	4.446	7.235
2	2005	28.627	41.523
3	2006	23.748	32.704
4	2007	11.994	21.261
	Jumlah	68.815	102.723

Sumber: Data Base TMB Unit Tenda tahun 2007.

7. Unit Pabrik Es.

Unit pabrik es memproduksi es untuk kebutuhan setiap anggota Taksi Mina Bahari maupun nelayan bukan anggota atau masyarakat umum. Untuk memenuhi kebutuhan es, nelayan anggota maupun masyarakat umum mengajukan permintaan es dengan mengisi nota BPB (bukti permintaan barang) dengan persetujuan dari site mamajer, kemudian nota tersebut dibawa keunit pabrik es untuk mengambil es. Untuk nelayan anggota pembayaran dilakukan dengan cara kredit atau dibayar setelah selesai melakukan kegiatan produksi sedangkan untuk masyarakat umum diwajibkan untuk membayar langsung pada saat pelayanan. Jumlah kebutuhan es untuk anggota Taksi Mina Bahai disajikan secara rinci dalam Tabel 8.

Tabel 8. Data Jumlah Kebutuhan Es Nelayan Anggota TMB Tahun 2004 – 2007

No	Tahun	Jumlah kebutuhan Es (balok)
1	2004	3.051
2	2005	13.473
3	2006	9.333
4	2007	7.196
	Jumlah	33.053

Sumber: Data Base TMB Unit Tenda tahun 2007.

8. Unit Toserba.

Unit toserba bertugas menyediakan kebutuhan sembako baik untuk kebutuhan nelayan melaut maupun untuk keperluan keluarga nelayan. Unit toserba ini selain menyediakan sembako juga menyediakan barang kebutuhan rumah tangga serta juga menyediakan bahan alat perikanan. Nelayan anggota maupun masyarakat umum terlebih dahulu mengajukan permintaan kebutuhan pokok dengan mengisi nota BPB (bukti permintaan barang) dengan persetujuan dari site mamajer, kemudian nota tersebut dibawa keunit toserba untuk mengambil kebutuhan pokok yang diinginkan. Untuk nelayan anggota pembayaran dilakukan dengan cara kredit atau dibayar setelah selesai melakukan kegiatan produksi sedangkan untuk masyarakat umum diwajibkan untuk membayar langsung pada saat pelayanan. Jumlah hasil penjualan barang di toserba Taksi Mina Bahari disajikan secara rinci dalam Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah Hasil Penjualan Barang di Toserba TMB

No	Tahun	Jumlah Hasil penjualan (Rp)
1	2004	41.349.750
2	2005	245.467.575
3	2006	233.873.975
4	2007	135.447.525
	Jumlah	656.138.825

Sumber: Data Base TMB Unit Tenda tahun 2007.

9. Unit Pemasaran.

Unit pemasaran bertanggung jawab untuk menampung dan memasarkan hasil tangkapan nelayan yang ikut dalam program Taksi Mina Bahari. Sistem pemasarannya dilakukan secara terbuka di tempat pelelangan ikan dan dibayar secara tunai. Data jumlah hasil tangkapan nelayan anggota Taksi Mina Bahari disajikan secara rinci dalam Tabel 10.

Tabel 10. Jumlah Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Anggota Tahun 2004-2006.

No	Jenis Ikan	Jumlah Tangkapan Tahun		
		2004 (kg)	2005 (kg)	2006 (kg)
1	Tuna	17.414	33.178	21.189
2	Cakalang	9.513	18.225	14.500
3	Layang	12.245	32.277	29.840

Sumber: Data Base TMB Unit Tenda tahun 2007.

5.2 Mekanisme Pelaksanaan Usaha Penangkapan ikan anggota Program Taksi Mina Bahari

Pihak proyek, manajemen program Taksi Mina Bahari menyediakan kapal, mesin kapal dan alat tangkap yang dibutuhkan nelayan dengan harga dan nilai yang disepakati bersama untuk selanjutnya diberikan dalam bentuk kredit modal kerja atau kredit amprak dan kredit investasi kepada nelayan baik perorangan maupun kelompok untuk mengoperasikan kapal tersebut yang akan dicicil melalui sistem bagi hasil sampai lunas dan menjadi milik nelayan atau kelompok. Sistem bagi hasil yang akan diterapkan adalah sesuai Undang-Undang bagi hasil nelayan yaitu untuk kapal yang menggunakan mesin adalah 40% bagian nelayan dan 60% bagian pemilik setelah dipotong biaya eksploitasi, namun pada program taksi mina bahari ini akan diberlakukan pengelolaan keuangan anggaran dan pendapatan sesuai kesepakatan, untuk itu diusahakan agar hasil penjualan produksi (hasil tangkap) dibagi masing-masing 33,3% untuk biaya operasional yang terdiri dari biaya pengadaan BBM, kebutuhan es dan kebutuhan sembako selama melakukan proses produksi, biaya operasional dibayar kepada pihak manajemen Taksi Mina Bahari setelah melakukan kegiatan produksi atau setelah ikan hasil tangkapan telah terjual. Biaya kredit investasi yang berupa cicilan harga sarana produksi seperti kapal dan alat tangkap sebesar 33,3%, biaya ini dibayar kepada pihak manajemen Taksi Mina Bahari sekali dalam sebulan sesuai dengan perjanjian antara anggota dengan pihak manajemen Taksi Mina Bahari, dan sisanya 33,3% di peruntukkan bagi anak buah kapal. Pihak manajemen Taksi Mina Bahari mengharuskan setiap anggotanya menyimpan 5% dari hasil produksinya sebagai dana titipan sesuai dengan kesepakatan perjanjian

keanggotaan, dana titipan dimaksudkan sebagai dana untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu anggota tidak dapat membayar biaya pelayanan dari manajemen Taksi Mina Bahari seperti biaya operasional produksi atau biaya cicilan kredit.

Salah satu contoh analisa usaha pembagian hasil pendapatan dari salah satu anggota Taksi Mina Bahari,

- Biaya oprasional untuk melaut yang terdiri dari :
 - Kebutuhan BBM (solar) sebanyak 50 liter @ Rp 5.500 = Rp. 275.000
 - kebutuhan Es sebanyak 15 balok @ Rp. 5.500 = Rp. 82.500
 - Kebutuhan sembako, terdiri dari :
 - 15 kg beras @ Rp. 5000 = Rp. 75.000
 - 2 Dos mie instan @ Rp. 50.000 = Rp. 100.000
 - 3 pak rokok = Rp. 150.000
 - Snack = Rp. 100.000
 - Jumlah biaya oprasional sebesar Rp. 782.500
- Hasil tangkapan nelayan anggota dalam satu kali proses produksi adalah :
 - Ikan tuna 350 kg @ Rp. 35.000 = Rp. 12.250.000
 - Ikan cakalang 150 kg @ Rp. 15.000 = Rp. 2.250.000
 - Ikan layang 100 kg @ Rp. 10.000 = Rp. 1.000.000
 - Jumlah hasil penjualan ikan tangkapan sebesar Rp. 15.500.000

Berdasarkan pendapatan tersebut nelayan mengeluarkan dana titipan sebesar 5% atau sebesar Rp. 775.000, nelayan anggota Taksi Mina Bahari tidak selamanya mengeluarkan dana titipan kepada pihak manajemen setelah melakukan kegiatan

produksi kecuali bila dana titipan yang sebelumnya ada di pihak manajemen telah berkurang atau habis. Sedangkan pembagian hasil yang diterapkan oleh manajemen Taksi Mina Bahari setelah dipotong 5% untuk biaya titipan yaitu masing-masing pos anggaran memperoleh anggaran sebesar Rp. 4.908.300. Jika anggaran oprasional dan biaya cicilan sarana produksi memperoleh sisa maka akan dimasukkan kedalam anggaran untuk biaya anak buah kapal dan bila dalam operasi penangkapan tidak mendapatkan hasil yang tidak mencukupi untuk membayar biaya operasional dan biaya cicilan sarana produksi maka pihak manajemen memotong dana titipan yang diserahkan oleh anggota.

5.2.1 Tahapan Untuk Melaut

Sebelum kapal tersebut berangkat melaut untuk menangkap ikan, maka kapal tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesempurnaan dan kelayakan kapal untuk melaut oleh unit pemeliharaan perbengkelan/galangan. Setelah kapal dinyatakan layak untuk melaut oleh penanggung jawab galangan, selanjutnya kapal diberi surat pengantar untuk mengisi BBM oleh penanggung jawab unit BBM, kemudian mengambil surat pengantar untuk mengisi kebutuhan es dari penanggung jawab unit pabrik es dan yang terakhir mengambil keperluan sembako di unit toserba. Setelah kapal melengkapi kebutuhannya untuk melaut maka pihak manajemen akan melakukan pengecekan akhir kelayakan kapal untuk melaut. Dalam melaksanakan pemeriksaan kelayakan kapal nelayan anggota sebelum melakukan penangkapan, pihak manajemen Taksi Mina Bahari tidak memungut biaya sama sekali.

5.2.2 Penanganan Ikan Diatas Kapal

Penangkapan ikan hasil tangkapan di atas kapal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan HACCP dan mekanisme Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT). Jumlah pemakaian es disesuaikan dengan jumlah tangkapan ikan yang ada serta penyusutan ikan di palkah diatur sesuai dengan waktu penangkapan sehingga diperoleh mutu yang sama.

Kebutuhan es yang digunakan oleh nelayan anggota Taksi Mina Bahari dalam sekali melakukan proses produksi sebanyak 15 balok es, dengan rasio perbandingan antara pemakaian es dengan jumlah ikan adalah 2 banding 1 atau 2 kilogram es sama dengan 1 kilogram berat ikan.

Dalam penanganan di atas kapal ikan hasil tangkapan dipisahkan sesuai dengan jenisnya kemudian disusun didalam palka dan diberi es agar kesegaran ikan dapat terjaga, cara penangannya yaitu pada dasar palka diberi es kemudian ikan dimasukkan dan disusun rapi setelah itu ditaburi es lagi begitu seterusnya sampai ikan sudah dimasukkan semua kedalam palka, kemudian palka ditutup rapat agar suhu didalam palka tetap terjaga. Jika hasil tangkapan banyak dan kapasitas palka tidak mencukupi nelayan berjaga-jaga dengan membawa colbox.

5.2.3 Pembongkaran Hasil Tangkapan

Pada saat kapal telah merapat di dermaga/TPI maka nahkoda segera melapor ke manajemen Taksi Mina Bahari untuk segera melakukan pembongkaran ikan. Ikan hasil tangkapan dikeluarkan dari palka kemudian diturunkan dari atas kapal, ikan hasil tangkapan dipisahkan berdasarkan jenis ikan dan ukurannya dalam keranjang.

Tujuan dari pemisahan ikan ini yaitu agar memudahkan dalam penimbangan dan juga dalam menentukan klasifikasi mutu ikan serta penentuan nilai jual (harga) ikan hasil tangkapan.

5.2.4 Pemasaran Hasil Tangkapan

Pemasaran hasil tangkapan nelayan anggota Taksi Mina Bahari akan dilakukan oleh unit pemasaran kepada pembeli, baik itu pedagang pengumpul maupun pabrik pengolahan ikan yang ada di Gorontalo. Unit pemasaran memasarkan hasil tangkapan nelayan anggota melalui mekanisme pelelangan secara langsung dan terbuka di tempat pelelangan ikan, harga jual ikan hasil tangkapan nelayan anggota sesuai dengan harga pasar yang ada ditempat tersebut dengan pembayaran secara tunai atau langsung ke nelayan. Ikan hasil tangkapan nelayan yang tergolong kualitas bagus atau ekspor dibeli oleh pabrik pengolahan ikan dan pedagang pengumpul, sedangkan ikan yang tidak masuk golongan ikan ekspor biasanya dibeli oleh pedagang-pedagang kecil yang kemudian dipasarkan ke masyarakat umum yang ada di Kota Gorontalo. Setelah semua ikan hasil tangkapan nelayan anggota terjual habis, unit pemasaran melaporkan jumlah ikan yang terjual kepada pihak manajemen Taksi Mina Bahari untuk diadakan pencatatan.

5.3 Respon Masyarakat Terhadap Program Taksi Mina Bahari

5.3.1 Respon Masyarakat Untuk Menjadi Anggota Taksi Mina Bahari

Konsep pembinaan usaha nelayan melalui program Taksi Mina Bahari yang dicetuskan oleh Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Gorontalo bertujuan untuk

memudahkan nelayan memperoleh fasilitas dalam mengelolah usahanya, sehingga dapat memacu peningkatan pendapatan nelayan agar kesejahteraan para nelayan lebih meningkat.

Untuk manajemen Taksi Mina Bahari unit tenda yang terletak di wilayah pesisir Kota Gorontalo terbentuk pada bulan Juni 2004 dan mulai beroperasi pada tanggal 27 Juli 2004 setelah diresmikan oleh Wakil Gubernur Gorontalo. Sejak terbentuknya Manajemen Taksi Mina Bahari unit tenda jumlah nelayan yang menjadi anggota dari tahun ketahun terus bertambah, ini dapat dilihat pada tabel jumlah anggota Taksi Mina Bahari secara rinci disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Anggota Taksi Mina Bahari Tahun 2004 - 2006

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2004	33
2	2005	48
3	2006	33
	Jumlah	114

Sumber: Data Base TMB Unit Tenda tahun 2007.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa masyarakat nelayan yang berada di wilayah pesisir Kota Gorontalo sangat antusias dengan adanya program Taksi Mina Bahari. Pada awal terbentuknya tahun 2004 anggota Taksi Mina Bahari unit Tenda hanya berjumlah 33 orang, kemudian pada tahun 2005 jumlah nelayan yang masuk menjadi anggota sebanyak 48 orang dan pada tahun 2006 nelayan yang menjadi anggota bertambah menjadi 33 orang, jadi jumlah keseluruhan anggota Taksi Mina Bahari dari tahun 2004 sampai 2006 sebanyak 114 orang yang tersebar di Kelurahan Tanjung kramat di Kota Gorontalo.

Adapun persyaratan untuk menjadi anggota dari Taksi Mina Bahari yaitu:

1. Mengisi formulir calon anggota.
2. Mengisi surat permohonan keanggotaan
3. Berdomisili di wilayah Taksi Mina Bahari.
4. Bersedia mematuhi semua ketentuan Taksi Mina Bahari.
5. Memiliki armada penangkapan
6. Melampirkan :
 - a. Foto copy KTP suami dan istri yang masi berlaku.
 - b. Foto copy kartu keluarga.
 - c. Pasfoto suami istri 2x3 sebanyak 2 lembar.
 - d. Surat keterangan pemerintah setempat yang menyatakan status nelayan yang sesungguhnya.

Dari hasil wawancara dengan nelayan yang telah menjadi anggota di lapangan menunjukkan bahwa untuk menjadi anggota Taksi Mina Bahari begitu mudah karena persyaratan yang diajukan oleh pihak manajemen tidak begitu sulit dan membingungkan nelayan. Respon nelayan mengenai persyaratan menjadi anggota Taksi Mina Bahari secara rinci disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12. Data Respon Nelayan Mengenai Persyaratan Menjadi Anggota TMB.

No	Persyaratan untuk menjadi anggota TMB	Responden
1	Mudah	75
2	Berbelit-belit	-
3	Susah	-
	Jumlah	75

Sumber: Data Diolah Tahun 2007.

5.3.2 Respon Nelayan Anggota Taksi Mina Bahari Mengenai Angsuran Kredit

Kredit investasi yang dipinjam oleh nelayan anggota dikembalikan kepada pihak manajeme melalui lembaga keuangan nelayan (LKN) dengan ditambah jasa pinjaman atau bunga sebesar 6 % pertahun dengan lama kredit maksimal 2 (dua) tahun dengan angsuran dilakukan satu kali dalam satu bulan. Jumlah angsuran kredit investasi disajikan secara rinci dalam Tabel 13.

Tabel 13. Jumlah Angsuran Kredit Investasi Anggota TMB unit Tenda Tahun 2004-2007.

No	Tahun	Jumlah Agsuran (Rp)
1	2004	69.182.627
2	2005	399.115.702
3	2006	411.336.350
4	2007	281.116.500

Sumber Data Base TMB Unit Tenda.

Sedangkan untuk pembayaran angsuran kredit amprak atau modal kerja dilakukan nelayan anggota setiap habis melakukan kegiatan penangkapan. Jumlah angsuran Kredit amprak disajikan secara rinci dalam Tabel 14.

Tabel 14. Jumlah angsuran Kredit Amprak anggota TMB unit Tenda Tahun 2004-2007.

No	Tahun	Jumlah Agsuran (Rp)
1	2004	16.599.000
2	2005	92.418.000
3	2006	35.186.500
4	2007	15.591.500

Sumber Data Base TMB Unit Tenda.

Data jumlah angsuran kredit investasi dan kredit amprak pada tahun 2004 di mulai pada bulan Agustus 2004. Sedangkan untuk jumlah angsuran kredit investasi dan kredit amprak pada tahun 2007 data diambil sampai bulan Mei.

Dari hasil wawancara di lapangan dengan nelayan anggota Taksi Mina Bahari menunjukkan bahwa sebahagian besar responden menyatakan bahwa mereka tidak menemukan kesulitan dalam hal pembayaran kredit baik itu kredit investasi maupun kredit amprak, sedangkan responden yang menyatakan bahwa menemukan kesulitan beralasan bahwa kendala yang dapati yaitu bila hasil tangkapan nelayan sedikit atau nelayan pulang tanpa membawa hasil. Data Respon nelayan tentang angsuran kredit disajikan secara rinci dalam Tabel 15.

Tabel 15. Data Responden nelayan mengenai angsuran kredit.

No	Dalam membayar angsuran menemui kendala	Responden
1	Ya	20
2	Tidak	55
	Jumlah	75

Sumber: Data Diolah Tahun 2007.

5.3.3 Respon Nelayan Anggota Mengenai Manfaat dari Program Taksi Mina Bahari.

Dengan adanya program pembinaan usaha perikanan dalam satu manajemen yang disebut dengan Taksi Mina Bahari, masyarakat Kota Gorontalo sangat terbantu dan mendapat kemudahan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana dimulai dari praproduksi sampai pemasaran hasil produksinya.

Dari hasil wawancara dengan nelayan anggota Taksi Mina Bahari di lapangan menyatakan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi mereka karena bisa langsung dirasakan oleh para nelayan serta tidak memerlukan persyaratan yang dapat memberatkan dan membingungkan nelayan. Beberapa nelayan setempat menyatakan bahwa program Taksi Mina Bahari berbeda dengan program yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya, dimana program tersebut hanya menyentuh sebagian kecil dari nelayan yang ada di daerah tersebut. Data respon nelayan anggota mengenai manfaat program Taksi Mina Bahari disajikan dalam Tabel 16.

Tabel 16. Respon Nelayan Mengenai Manfaat Program TMB.

No	Respon nelayan mengenai manfaat program TMB	Responden
1	Ya	75
2	Tidak	-
	Jumlah	75

Sumber: Data Diolah Tahun 2007.

5.4.4 Respon Nelayan Anggota Taksi Mina Bahari Menenai Tingkat Pendapatan.

Dari hasil survei dan wawancara dengan nelayan anggota Taksi Mina Bahari dilapangan, menunjukkan bahwa tingkat pendapatan nelayan sebelum dan sesudah menjadi anggota sangat berbeda. Menurut responden sebelum menjadi anggota Taksi Mina Bahari pendapatan mereka rata-rata sekali melaut hanya Rp.200.000 sampai Rp.500.000 setelah dikurangi dengan biaya oprasional. Salah satu yang menjadi kendala pada saat itu kurangnya modal, terbatasnya armada dan alat tangkap yang

dimiliki. Setelah menjadi anggota Taksi Mina Bahari secara perlahan tingkat pendapatan nelayan mulai meningkat menjadi paling sedikit Rp.1.000.000 sekali melaut ini tidak terlepas dengan adanya penambahan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan oprasional nelayan. Data responden yang menyatakan bahwa program Taksi Mina Bahari Meningkatkan pendapatan disajikan secara rinci dalam Tabel. 17.

Tabel. 17. Data Respon Nelayan Anggota mengenai peningkatan pendapatan.

No	Respon nelayan mengenai peningkatan pendapatan	Responden
1	Ya	75
2	Tidak	-
	Jumlah	75

Sumber: Data Diolah Tahun 2007.

Nelayan di pesisir Kota Gorontalo mengandalkan hasil tangkapan ikan tuna karena selain nilai jualnya tinggi dan juga pemasarannya sangat mudah, karena ikan tuna merupakan salah satu komoditas andalan Provinsi Gorontalo dibidang perikanan.

Setelah megikuti program Taksi Mina Bahari kehidupan masyarakat pesisir Tanjung Kramat Kota Gorontalo boleh dibilang jauh dari garis kemiskinan yang selama ini melekat pada daerah pesisir atau perkampungan nelayan di Indonesia, ini dibuktikan dengan kondisi perkampung yang jauh dari kesan kumuh dan semraut. Banyak rumah nelayan yang sudah permanen yang terbuat dari batu bata bahkan dilengkapi dengan perabotan rumah tangga yang terbilang mewah serta setiap rumah dilengkapi dengan barang elektronik seperti radio, tv dan parabola.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai peranan Taksi Mina Bahari terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Gorontalo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu :

1. Lembaga Pengelola Taksi Mina Bahari mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pihak manajemen dituntut harus mampu dalam hal manajerial serta menguasai teknologi yang berhubungan dengan ilmu perikanan yang sesuai dengan kaidah nasional dan internasional, seperti SSI, GMP, HACCP, PMMT, ISO.
2. Dalam mekanisme usaha penangkapan ikan, anggota Taksi Mina Bahari harus mengikuti beberapa prosedur yang diterapkan oleh pihak manajemen mulai dari prosedur sebelum melaut sampai pada pemasaran hasil tangkapan. Sedangkan untuk pembagian hasil tangkapan nelayan anggota Taksi Mina Bahari pihak manajemen membagi masing-masing 33,3% untuk biaya operasional, 33,3% untuk membiayai cicilan biaya investasi (kapal, alat tangkap dan mesin) dan 33,3% untuk biaya anak buah kapal.
3. Program pembinaan usaha perikanan dalam satu manajemen yang disebut Taksi Mina Bahari memberi manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang telah menjadi anggota. Masyarakat merespon baik dengan adanya program Taksi Mina Bahari, dapat dilihat dengan jumlah anggota yang terus meningkat,

disamping itu dengan adanya program ini nelayan yang menjadi anggota mendapat berbagai kemudahan dalam menjalankan proses produksinya dan secara tidak langsung pendapatan nelayan ikut meningkat.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah, Sebagai pertimbangan untuk membentuk manajemen Taksi Mina Bahari di tempat lain yang berada di Provinsi Gorontalo.
2. Bagi pengusaha, Sebagai informasi untuk penanaman modal dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah.
3. Bagi perguruan tinggi, Sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut mengenai Studi kelayakan dari program taksi mina bahari serta dampak dari program taksi mina bahari terhadap peningkatan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

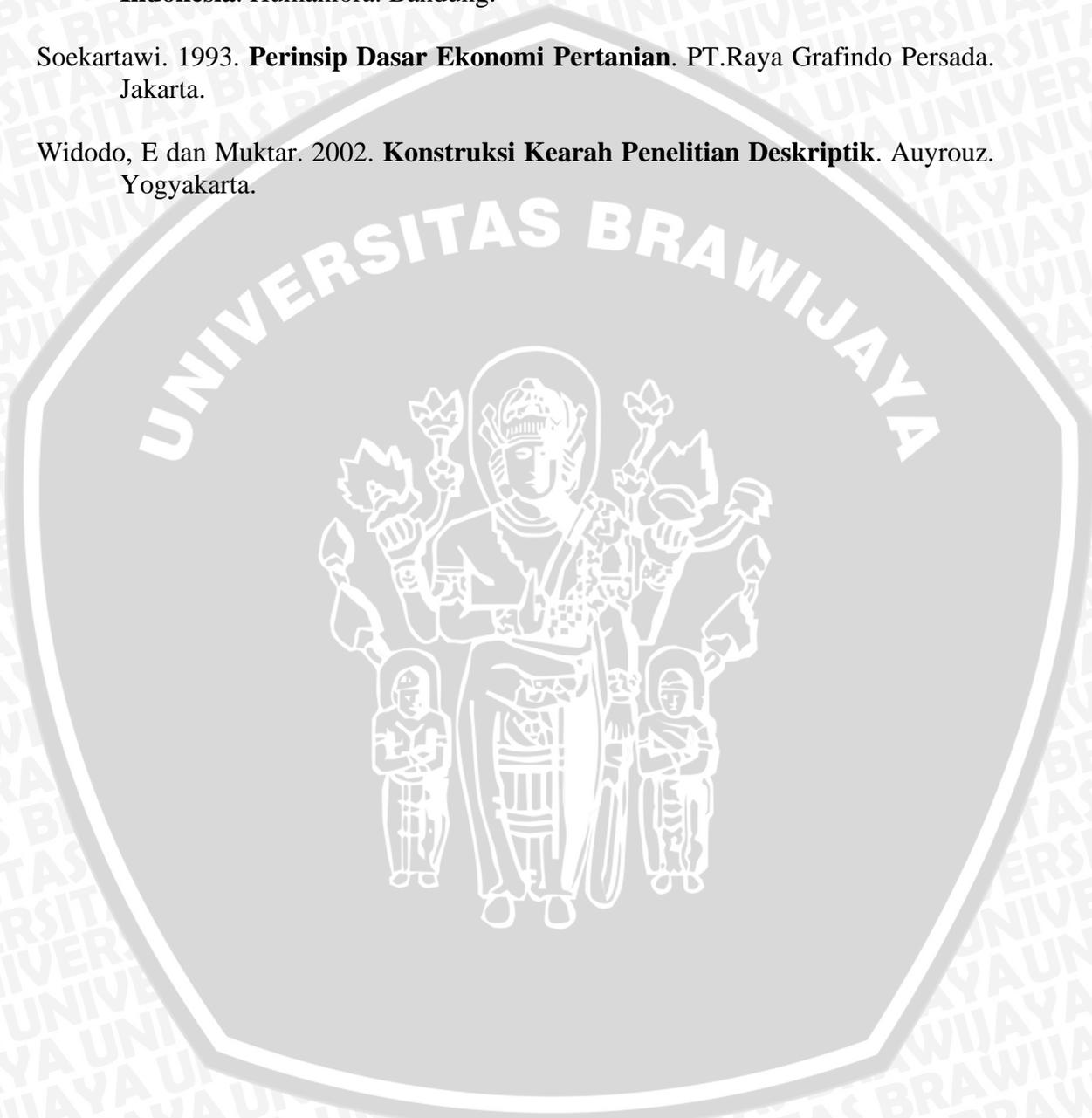
- _____. 2003. **Pembinaan Usaha Perikanan Melalui Taksi Mina Bahari**. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
- _____. 2005. **Teluk Tomini Satu-Satunya Teluk Di Dunia Yang Dilewati Garis Katulistiwa**. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
- _____. 2005. **Manajemen Oprasional Taksi Mina Bahari**. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
- _____. 2005. **Kota Gorontalo Dalam Angka**. Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo.
- _____. 2006. **Usulan Program Relokasi Usaha Dan Transmigrasi Nelayan Dengan Pola Taksi Mina Bahari**. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
- _____. 2006. Pemerintah Kota Gorontalo.
<http://www.gorontalo.com/plan/ind/kota-gorontalo.html>
- Agoes, W. P. 2005. **Menjual Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**. Jakarta.
- Kasmir. 2002. **Dasar-Dasar Perbankan**. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Kusnadi, M. A. 2006. **Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**. Humaniora. Bandung.
- Kusnadi. 1993. **Metode Penelitian Sosial (Survei)**. Fakultas Pertanian Uiversitas Brawijaya Malang.
- Kusumastanto, T. 2003. **Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi**. Humniora. Bandung.
- Nasir. 1988. **Metode Penelitian**. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Raharja Pratama dan Manurung. 2004. **Uang Perbankan Dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)**. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta.

Singarimbu, M dan Effendi, S. 1985. **Metode Penelitian Survei**. PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

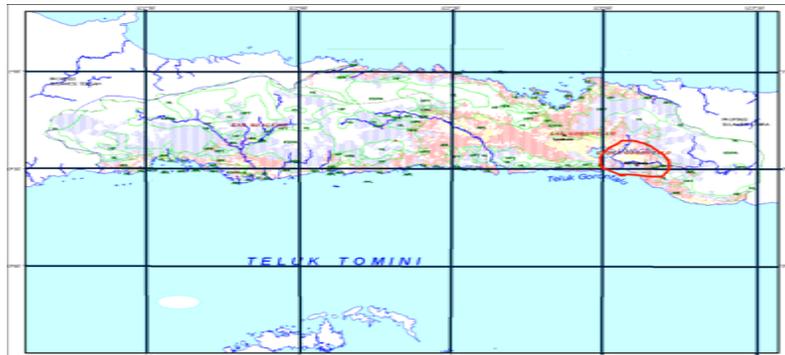
Solihin, A. Dkk. 2005. **Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia**. Humaniora. Bandung.

Soekartawi. 1993. **Perinsip Dasar Ekonomi Pertanian**. PT.Raya Grafindo Persada. Jakarta.

Widodo, E dan Muktar. 2002. **Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptik**. Auyrouz. Yogyakarta.



Lampiran 1. Peta lokasi penelitian



Provinsi Gorontalo

Skala 1 : 200.000

Lampiran 2. Foto Kantor Manajemen, unit waserda, unit BBM TMB Tenda



Kantor Manajemen Taksi Mina Bahari Unit Tenda.



Unit pelayanan waserda manajemen TMB Tenda



Unit pelayanan BBM mnajemen TMB Tenda



Lampiran 3. Foto unit pelayanan es dan salah satu armada penangkapan



Unit Pelayanan es balok TMB unit Tenda



Salah satu armada penangkapan ikan milik nelayan anggota TMB.



Lampiran 4. Foto Kegiatan nelayan anggota TMB unit Tenda



Kegiatan pengambilan BBM oleh neyan anggota di unit BBM.



Kegiatan pengambilan kebutuhan pokok di unit waserda



Kegiatan pemeliharaan mesin kapal di unit armada

Lampiran 5. Pembayaran kredit investasi dan amprak oleh anggota TMB di unit LKN



Lampiran 6. Kegiatan bongkar muat ikan hasil tangkapan di TPI Tenda

